

## ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN TERHADAP PENDAPATAN DAN INVESTASI MASYARAKAT DESA MOLINGKAPOTO KECAMATAN KWANDANG

Oleh

**Meimoon Ibrahim**

**Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo**

**e-mail : meimoonibrahim@yahoo.com**

Abstract

*This research aims to understand the impact of the segregation of kabupaten against investment and the income of the molingkapoto village. Analysis method used : (1) qualitative method which is to see the impact of the segregation of an area to describe the value of business and investment income and segregation of the community before and after; (2) Quantitative methods which is to see the impact of the segregation of seen in terms of business and investment income of the community against people using multiplier effect.*

*The results of research shows that segregation can provide the opportunity for the whole society in creating a variety of business and also can provide the opportunity the community desire to continue trying to do their best in order to make the level of community per capita income and the investments owned by the community who had not been utilized can then be used for various types of the business.*

*Keywords : Expansion, Income, Investment*

### PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan pada segala bidang banyak memberikan peluang bagi masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dengan masyarakat lainnya di daerah tertentu, makanya perlu peningkatan akses masyarakat melakukan proses perubahan menuju perbaikan sistem ekonomi kearah yang lebih baik dar tahun ketahun. Sehubungan dengan itu maka sangat wajarlah suatu daerah akan dimekarkan menjadi beberapa daerah lainnya karena ingin meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat sehingga daerah yang akan dimekarkan akan lebih cepat mengatur pemerintahannya yang baru berdasarkan tuntutan masyarakat sebelum adanya pemekaran.

Lebih jauh lagi dapat diuraikan bahwa pemekaran sama artinya dengan istilah pembentukan yaitu implementasi dari tuntutan masyarakat modern yang menghendaki percepatan proses pembangunan ekonomi pada berbagai segi kehidupan. Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang no 22 tahun 2002 tentang otonomisasi daerah bahwa setiap daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing berdasarkan potensi kekayaan yang dimiliki untuk dapat dipergunakan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat secara umum.

Untuk itu hal ini lebih mendorong bagi daerah dengan berdasarkan pada tuntutan tersebut sehingga sangat dibutuhkan berbagai potensi yang dimiliki untuk lebih dioptimalkan dalam mencapai

tujuan yang diamanatkan oleh bentuk pemekatan tadi. Memang telah banyak difahami bagi suatu daerah yang baru dimekarkan dan banyak yang menjadi persoalan yang sangat rumit adalah sumberdaya manusia yang dimiliki sangat terbatas adanya terutama pada bidang-bidang tertentu sangat dirasakan mengalami kekurangan.

Disamping itu, pola kehidupan masyarakat juga tetap diperhatikan terutama pada proses produksi yang ada pada masyarakat misalnya sistem produksi yang sifatnya tradisional lebih ditingkatkan kedepan kearah yang modern dengan terus memanfaatkan teknologi yang berkembang sehingga jumlah output yang diperoleh lebih meningkat jumlahnya dan unit-unit pendapatan pula secara signifikan terus meningkat pula.

Sebagaimana telah dialami oleh Kabupaten Gorontalo Utara di Kecamatan Kwandang yang telah dimekarkan sejak tahun 2007 yang lalu, banyak mengalami berbagai tantangan yang disebutkan diatas tetapi perlahan-lahan dapat diatasi dengan melakukan pembenahan tenaga kerja yang tidak dimiliki oleh daerah ini maka dengan terpaksa harus menerima sumber daya manusia yang dari luar unruk menjadi tenaga kerja atau pegawai baik langsung menjadi pegawai tetap maupun masih diangkat sebagai tenaga honorer dilingkungan pemerintah daerah.

Sejak pemekaran Kabupaten pusat pemerintahannya berdomisili di Desa Molu'o kurang lebih 1 tahun lamanya (2007-2008), tetapi

berdasarkan keputusan pemerintah daerah maka pusat pemerintahannya dipindahkan ke Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang sampai sekarang. Maka dengan adanya perindahan pusat pemerintahan tersebut hal ini diikuti pula berpindahnya jumlah pegawai yang belum memiliki tempat tinggal tetap untuk memilih tempat tinggal yang tetap dan bahkan ada yang sudah langsung membeli rumah masyarakat atau mengambil perumahan yang telah dibangun di Lokasi Desa Molingkapoto sebagai tempat tinggal mereka secara terus menerus apalagi dirasakan sangat dekat dengan tempat mereka bekerja.

Desa Molingkapoto merupakan salah satu Desa yang definif yang dibentuk lebih jauh dari terbentuknya daerah ini dan sekarang ini dipilih menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara karena disamping memiliki luas wilayah yang lebih luas dengan desa lainnya juga memiliki hamparan lahan yang sangat potensi untuk dijadikan lingkungan perkantoran, pemukiman dan perumahan serta pengembangan perdagangan bagi kebutuhan masyarakat nanti.

Untuk itu, faktor-faktor yang diakibatkan oleh pemekaran tersebut memberikan angin segar bagi masyarakat pada peningkatan usaha bagi masyarakat lokal maupun mendatangkan pengusaha dari luar daerah ini dan sekaligus secara signifikan akan berdampak meningkatnya jumlah penduduk Desa Molingkapoto sekarang ini serta peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat pula sangat meningkat terutama dilokasi perkantoran yang telah dibangun tersebut. Adapun penduduk yang bertambah ini sebagian besar dari pegawai dan staf yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah dan sebagiannya adalah para pengusaha yang ingin menikmati peningkatan usahanya di daerah Gerbang Emas yang damai dan sejahtera. Berdasarkan pengamatan setelah adanya pemekaran sangat jelas akan memberikan dampak yang sangat baik bagi peningkatan pendapatan masyarakat seperti usaha fotocopi, kios serta rumah-rumah makan dan penjualan ATK dan ATM yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan masalah pokok yakni bagaimana Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pendapatan dan Investasi Masyarakat Desa Molingkapoto di Kecamatan Kwandang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pemekaran dan implementasinya

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2007 (2007: 1) tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo mempertimbangkan bahwa :

1. Untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Gorontalo pada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada Khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo dipandang perlu membentuk kabupaten Gorontalo Utara di wilayah Provinsi Gorontalo
3. Pembentukan Gorontalo Utara diharapkan akan mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Lebih lanjut disampaikan dalam pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo tersebut adalah : Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menyikapi isi Undang-Undang tersebut maka jelas bahwa setiap daerah baik daerah provinsi membentuk provinsi yang baru, Kabupaten membentuk kabupaten yang baru, sebuah kecamatan dapat membentuk kecamatan yang baru dan bahkan sampai ke Desa/Kelurahan, Dusun/lingkungan akan dapat dibentuk menjadi baru dari hasil pemekaran induknya. Semata-mata semua itu dapat dilakukan dengan didasarkan pada aturan –aturan yang berlaku serta partisipasi masyarakat dan tetap memperhatikan jumlah penduduk serta jumlah Desa yang dimiliki masing-masing wilayah dimekarkan secara umum.

Dengan upaya pemekaran / Pembentukan tersebut dapat diharapkan pula akan meningkatkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang harus didukung oleh kondisi geografis, tofografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah/ jumlah desa, pertahanan keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemekaran pada prinsipnya selalu memberikan peluang bagi suatu daerah atau wilayah tertentu dalam meningkatkan akses peningkatan obyek usaha yang belum berkembang menjadi lebih berkembang sehingga akan berdampak pada upaya peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep tersebut sangatlah perlu dibutuhkan bagi pengembangan suatu desa yang telah definitive terutama diperhadapkan pada potensinya yang dimiliki untuk mendukung peningkatan proses produksi barang dan jasa yang diminta oleh berbagai jenis rumah tangga yang ada pada perekonomian sehingga pendapatan masyarakat lebih meningkat dari sebelumnya.

### **Pengertian Pemekaran secara umum**

Pemekaran secara umum berasal dari kata mekar yang identik dengan setangkai bunga yang baru saja mengeluarkan bunganya yang indah dan berseri. Tetapi pemekaran yang dimaksud disini adalah sama dengan kata pembentukan suatu daerah yang satu menjadi beberapa bagian yang terpisahkan sehingga dapat membentuk satu wilayah yang definitive didalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Laporan keuangan pengelolaan keuangan daerah dan Pelayanan publik Propinsi Gorontalo yang merupakan hasil kerja sama Universitas Gorontalo dengan Pemerintah Daerah (2008: 2) dapat diuraikan sederetan pengalaman yang berjiwa patriotik masyarakat Gorontalo dari perjuangan melawan penjajah Belanda, kemudian perjuangan untuk mencapai kesetaraan sosial dan politik serta keadilan ekonomi. Dengan dasar jiwa perjuangan tersebut akan mendorong untuk memekarkan diri dan membentuk suatu propinsi yang baru menjadi Propinsi Gorontalo. Dan pada saat dimekarkan baru memiliki 2 Kabupaten, 1 Kotamadya. Dan akhirnya sekarang ini memiliki 5

Kabupaten dan 1 Kota. Dan baru saja dimekarkan adalah Kabupaten Gorontalo Utara itulah suatu perjuangan yang baru diperjuangkan pemekarannya dengan tujuan mempercepat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

### **Pengertian Pendapatan dalam konteks Ilmu Ekonomi**

Menurut teori ekonomi, pengertian pendapatan adalah hasil uang atau keuntungan lainnya yang timbul dari penggunaan kekayaan atau jasa – jasa manusia. Pendapatan juga diartikan sebagai pendapatan netto dari uang, barang dan jasa yang dinilai dengan rupiah dan diterima oleh para pekerja dan para anggota keluarga dari setiap usaha yang dilakukannya selama jangka waktu tertentu. Sedangkan alokasi pendapatanm selalu ditunjukkan untuk komsumsi, tabungan dan investasi.

Berikut akan disajikan oleh penulis beberapa pengertian pendapatan walaupun pengertian tersebut pada dasarnya hampir memiliki perbedaan antara beberapa pengertian yang akan dikemukakan nanti.

Menurut Partadiredja ( 2001 : 56 ) bahwa pendapatan adalah uang, barang atau materi atau jasa – jasa yang diterima atau bertambah besar dari pemakaian kapital, pemberian jasa perorangan atau keduanya. Yang termasuk dalam pendapatan adalah upah, gaji, sewa tanah, deviden uang, jasa keuntungan, gaji tahun dll sebagainya.

Menurut Boediono (2000 : 198) pendapatan adalah pendapatan (income ) dari seseorang harga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor – faktor produksi yang dimilikinya kepada kepada sektor produksi lainnya.

Menurut Todaro (2001 : 135) bahwa pendapatan dibedakan menjadi dua bagian yaitu pendapatan uang ( maney income ) dan pendapatan nyata atau riil (real income ). Pendapatan uang dimaksudkan sebagai keseluruhan jumlah mata uang (rupah, dollar, pesso dll ) yang diperoleh seseorang dalam setiap bulannya. Sedangkan pendapatan nyata adalah kwantitas barang fisik dan jasa yang dapat dibelinya dengan pendapatan uang. Oleh karena itu pendapatan nyata adalah pendapatan uang yang nilainya dengan tingkat nilai harga pada umummnya.

Hasil berupa uang dan atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa – jasa mnanusia yang bebas, Kadariah (2000 : 7) Sedangkan pengertian pendapatan menurut Singarimbun (2000 : 63) adalah arus

kesempatan yang memberikan pilihan – pilihan diantara berbagai alternatif penggunaan sumber – sumber yang langka.

Sementara itu, menurut Sumarsono (2001 : 199) pendapatan adalah arus kekayaan dalam bentuk uang tunai, piutang atau harta lainnya yang termasuk kedalam perusahaan sebagai akibat penjualan barang atau penyerahan jasa. Selanjutnya menurut Komarudin (2000 : 207) bahwa pendapatan pada hakekatnya merupakan balas jasa yang dikerbankan termasuk didalamnya upah, gaji, tanah, modal, deviden, honorarium, laba dan pensiun.

Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa pengertian – pengertian pendapatan yang oleh berbagai ahli tersebut ternyata pada dasarnya mengandung pokok pengertian yang sama, dimana bahwa pendapatan adalah uang atau kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha ( balas Jasa ) berdasarkan sumberdaya yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan serta institusi pemerintahan ( berupa pajak )

#### **Pengertian Wilayah menurut konsep teori**

Wilayah merupakan hak suatu daerah atau desa yang merupakan salah satu terbentuknya menjadi suatu negara yang merdeka yang didalamnya terdiri dari beberapa jenis budaya, bahasa serta suku yang mengikat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lainnya.

Adapun pengertian Ilmu Pembangunan wilayah adalah wahana lintas disiplin yang mencakup berbagai teori dan ilmu terapan yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu lingkungan dan sebagainya, Budiharsono (2005 : 9).

Hal ini dapat dimengerti bahwa pembangunan itu sendiri merupakan fenomena multifaset yang memerlukan berbagai usaha manusia dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang menyatu dan saling berkaitan. Pada prinsipnya ilmu pembangunan wilayah sebenarnya dalam perkembangannya lebih mendekati ilmu ekonomi, perbedaan pokoknya terletak pada perlakuan terhadap dimensi spasial.

Menurut Misra dalam Budiharsono (2005 : 9) lebih lanjut dikatakan bahwa ilmu pembangunan wilayah merupakan disiplin ilmu yang ditopang oleh empat pilar yaitu geografi, ekonomi, perencanaan kota dan teori lokasi.

Pembentukan Kabupaten sebagaimana dalam pasal 3 Perpu RI nomor 19 tahun 2008 harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik

kewilayahan. Kemudian pasal 5 dikatakan bahwa syarat fisik kewilayahan sebagaimana pada pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi, calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di lokasi pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yakni di Desa Molingkapoto sebanyak 50 orang yang memiliki usaha rumah makan terdiri dari 15 orang, memiliki kios sebanyak 25 orang dan jenis usaha lainnya sebanyak 10 orang

### **Sampel**

Sampel yang akan diteliti adalah seluruh masyarakat yang memiliki usaha rumah makan, kios dan usaha lainnya sebanyak 50 orang yang berarti penelitiannya secara sensus.

### **Definisi Operasional variabel**

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam penafsiran terhadap beberapa variable yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memberikan definisi operasional variabel yang menjadi batasan sebagai berikut :

1. Pemekaran/Pembentukan suatu daerah yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka usaha melakukan pembentukan menjadi suatu Kabupaten sampai pada penentuan wilayah ibukota dan letak perkantorrannya pada suatu desa tertentu di lingkungan kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pendapatan adalah hasil, uang atau keuntungan lainnya yang timbul dari penggunaan kekayaan atau jasa – jasa manusia. Pendapatan juga diartikan sebagai pendapatan netto dari uang, barang dan jasa yang dinilai dengan rupiah dan diterima oleh para pekerja dan para anggota keluarga dari setiap usaha yang dilakukannya selama jangka waktu tertentu
3. Wilayah atau Desa adalah pusat kegiatan desa yang menjadi tempat berdirinya ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara yang mempengaruhi kegiatan usaha masyarakat sekitarnya.
4. Masyarakat adalah seluruh warga yang berada dan bertempat tinggal tetap di suatu di Desa Molingkapoto yang banyak mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

### Metode Pengumpulan Data

1. Library Research adalah pengambilan data langsung pada instansi atau lembaga berupa literatur yang diperoleh berhubungan dengan obyek penelitian
2. Field Research adalah pengambilan data dengan melakukan cara sebagai berikut:
  - a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian yakni di Desa Molingkapoto di Kecamatan Kwandang
  - b. Interview yaitu dilakukan langsung terhadap responden kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang.
  - c. Questionare yaitu Daftar atau catatan pertanyaan yang disediakan dalam pengambilan data kepada masyarakat dan atau pemerintah setempat

### Jenis data

- a. Data Primer yaitu data yang bersumber langsung dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan kegiatan pemekaran berdampak pada pendapatan masyarakat
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen atau arsip-arsip tertulis

pada setiap instansi di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang

### Sumber data

Data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif serta data yang diperoleh langsung kegiatan masyarakat serta pemerintah sehubungan dampak pemekaran suatu wilayah terhadap masyarakat sekitarnya.

### Metode Analisis

#### Metode analisis Kualitatif

Metode analisis ini akan melihat dampak pemekaran suatu daerah dengan mendeskripsikan dan mengkomparasikan nilai usaha dan investasi dan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran.

#### Metode analisis Kuantitatif

Metode ini dilakukan untuk melihat dampak pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari segi usaha/investasi masyarakat terhadap pendapatan masyarakat dengan menggunakan Multiflier Effect yang dikutip dari Suparmoko (2001 : 57) dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$KI = \frac{\sum dy}{\sum di} = \frac{\sum Y_t - \sum Y_{t-1}}{\sum I_t - \sum I_{t-1}}$$

dimana  $Y_t$  = Pendapatan Responden tahun berjalan  
 $Y_{t-1}$  = Pendapatan responden tahun sebelumnya  
 $I_t$  = Investasi tahun berjalan  
 $I_{t-1}$  = Investasi tahun sebelumnya

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Deskripsi obyek penelitian

Desa Molingkapoto merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kwandang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara yang baru saja dimekarkan dari Kabupaten Gorontalo pada tahun 2007. Adapun Luas Desa Molingkapoto adalah 11,43 km<sup>2</sup> atau 34.43 % dari luas Kecamatan Kwandang, dengan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mootinelo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pontolo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolongio

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo

Desa Molingkapoto terletak ditengah-tengah Kecamatan Kwandang yang merupakan Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara yang terletak pada 00<sup>o</sup>47' - 00<sup>o</sup>48' Lintang Utara, 122<sup>o</sup>52' - 122<sup>o</sup>37' Bujur Timur.

Kemudian Jumlah penduduk Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang tahun 2009 adalah 3.116 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 1.525 jiwa dan perempuan 1.591 jiwa. Kepadatan penduduk Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang tahun 2009 sebesar 56 jiwa per km<sup>2</sup>. Dusun yang paling padat penduduknya adalah Dusun Botuliodu berjumlah 1110 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan yang terendah adalah Dusun Buade berjumlah 177 jiwa per km<sup>2</sup>.

Adapun keadaan penduduk Desa Dusun adalah sebagai berikut :  
Molingkapoto Kecamatan Kwandang menurut

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Molingkapoto Kec. Kwandang tahun 2009

No	Dusun	Luas(km)	Laki-Laki	Perem p	Sex Ratio
1	Botuliodu	9,00	539	571	94.40
2	Buade	11,54	91	86	105.81
3	Botungobungo	5,50	158	161	98.14
4	Selatan	23,10	236	276	85.51
5	Botungobungo Utara Tuhiango	23.10	501	497	100.80
Jumlah		<b>72,30</b>	1525	1591	95.85

Sumber Data: Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang, 2010

Dijelaskan pula bahwa jumlah penduduk di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang selang tahun 2009-2010 lebih banyak penduduk perempuan dari pada laki-laki dengan sex ratio rata-rata hanya 95.85. Hal ini akan memberikan peluang bagi usaha masyarakat setelah adanya pemekaran karena dapat memungkinkan terjadi

peningkatan usaha seperti rumah makan, fotocopy, kios-kios dikelola oleh ibu-ibu sebagai pelakunya.

Kemudian jumlah penduduk Desa Molingkapoto dilihat dari jumlah kepala keluarga (KK) dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Molingkapoto

No	Dusun	Jumlah KK
1	Botuliodu	263
2	Buade	218
3	Botungobungo Selatan	150
4	Botungobungo Utara	103
5	Tuhiango	96
Jumlah		830

Sumber, Kantor Desa Molingkapoto, 2010

Jumlah kepala keluarga di Desa Molingkapoto yang tertinggi nampak terdapat pada dusun Botuliodu, dusun Buade, dusun Botungobungo Selatan, Dusun Botungobungo Utara dan yang paling sedikit adalah dusun Tuhiango. Hal ini memberikan peluang bagi pengembangan Desa Molingkapoto karena sangat didukung oleh jumlah kepala keluarga yang terbanyak apalagi kalau semuanya produktif.

Selanjutnya fasilitas pendukung bagi berkembangnya penduduk dan kegiatan pemerintah Desa Molingkapoto sangat berpengaruh pula berkembangnya jumlah perdagangan, industri dan pertambangan rakyat/penggalian untuk pemenuhan kebutuhan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. kegiatan usaha perdagangan, Industri, Pertambangan/ Galian di Desa Molingkapoto tahun 2010

No	Jenis Kegiatan usaha	Jumlah
1	Pasar	1
2	Rumah makan	1
3	Warung makan	23
4	Jahit pakaian	11
5	Batu bata	15
6	Sulam krawang/Bordir	1
7	Batu gunung	3

Sumber, Kecamatan Kwandang dalam Angka, 2010

Dengan memperhatikan tabel tersebut nampak bahwa dukungan kegiatan perekonomian yang berada disekitar ibu kota kabupaten yang menjadi pusat kegiatan pemerintah daerah sangat berpengaruh besar pada peningkatan berbagai

usaha yang ada pada masyarakat, misalnya berkembangnya usaha perdagangan, industry dan usaha pertambangan rakyat/galian. Berikut keadaan mata pencaharian Penduduk Desa Molingkapoto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Molingkapoto tahun 2009

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah ( Orang )	%
1	Petani	475	39,68
2	Buruh Tani	150	12,53
3	Nelayan	150	12,53
4	Pedagang	80	6,68
5	Tukang	42	3,52
6	Wiraswasta	300	25,06
Jumlah		1197	100

Sumber data, Kantor Desa Molingkapoto, 2010

Dengan berdasarkan pada tabel tersebut diatas bahwa jumlah penduduk yang termasuk pada Usaha pertanian adalah 475 orang atau 39,68 %, Usaha Buruh Tani 150 orang atau 12,53 %, Usaha Nelayan adalah 150 orang atau 12,53 % , Usaha Pedagang adalah 80 orang atau 6,68 %, Usaha Tukang adalah 42 orang atau 3,52 %, dan Wiraswasta adalah 300 orang atau 25,06 %. Yang jelas hampir sebagian penduduk banyak berkecimpung pada usaha pertanian maka merekalah yang sangat diharapkan fasilitas pendukung usaha pertanian di Desa Molingkapoto.

#### Deskripsi Variabel-Penelitian

Deskripsi data dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh masyarakat yang memiliki berbagai jenis usaha yang ada di Desa Molingkapoto dengan jumlah responden adalah 50 orang yang terdiri dari masyarakat yang memiliki usaha Rumah makan sebanyak 15 orang, usaha Kios/Toko sebanyak 25 orang dan jenis usaha lainnya sebanyak 10 orang, yang terdapat di beberapa dusun di Desa Melingkapoto.

Kemudian penelitian ini melihat bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang sebelum dan sesudah adanya pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara. Kajian ini akan memberikan pemikiran terhadap perkembangan ekonomi masyarakat tersebut dengan menjelaskan berbagai variabel

yang dilihat sangat berpengaruh langsung pada peningkatan usaha masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama dalam mendukung berjalannya kegiatan pemerintahan yang ada di Kabupaten yang baru ini.

Untuk lebih spesifik dan terarah pada obyek yang dianalisis maka penelitian ini akan menerangkan secara berurutan sebagai berikut :

#### a. Keadaan pendapatan Masyarakat Sebelum pemekaran Kabupaten

Pembangunan ekonomi sebelum adanya pemekaran tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi masih banyak ditemui berbagai kantong-kantong kemiskinan yang ada pada daerah-daerah tertentu sebagai akibat dari gejala yang mendasar pada masyarakat yaitu tingkat pendidikan yang sangat rendah, ketrampilan yang rendah serta banyak masyarakat yang kurang memiliki modal untuk berusaha, sehingga akan berdampak langsung pada tingkat pendapatan mereka akan semakin rendah dan bahkan dibawah tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk itu berikut ini dijelaskan hasil jawaban kuisisioner yang diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung kepada masyarakat tentang pendapatan sebelum adanya pemekaran Kabupaten sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 5. Data Hasil Kuisioner tentang pendapatan Masyarakat sebelum pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Pendapatan (Rp)	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	135.375 – 698.300	14	28,0
2.	698.301 – 1.261.226	27	54,0
3.	1.261.227 – 1.824.152	7	14,0
4	1.824.153 – 2.387.078	2	4,0
5	2.387.079 – 2.950.004	0	0,0
Jumlah		50	100

Sumber Data : Hasil Olahan , 2011

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan jumlah keadaan responden sebelum pemekaran dengan berbagai keterbatasan yang mereka miliki dalam melakukan berbagai usaha sehingga mereka mengatakan dalam kuisioner yang diajukan adalah yang berpendapatan antara 135.375–698.300 hanya berkisar 14 orang atau 28,0 %, antara 698.301 – 1.261.226 hanya berkisar 27 orang atau 54,0 %, antara 1.261.227 – 1.824.152 hanya berkisar 7 orang atau 14,0 %, antara 1.824.153 – 2.387.078 hanya berkisar 2 orang atau 4,0 %, antara 2.387.079 – 2.950.004 hanya berkisar 0 orang atau 0,0 %.

Dengan melihat keadaan responden pada tabel tersebut dapat dijelaskan lagi bahwa rata-rata jumlah pendapatan masyarakat yang didasarkan pada kuisioner tersebut makin banyak memiliki tingkat pendapatan yang sangat dibawah sekali yakni orang berpendapatan sebesar Rp 698.301 – 1.261.226 sampai 27 orang 54 % % dari reponden, dimana dalam keadaan ini masyarakat belum bisa melakukan pengembangan kegiatannya karena disamping memiliki modal tetapi daya beli berkurang dan hal ini lebih meningkatkan jumlah masyarakat yang miskin.

#### **b. Keadaan Pendapatan Masyarakat Sesudah pemekaran Kabupaten**

Pemekaran merupakan suatu tuntutan masyarakat ekonomi modern sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diawali dengan perlunya peningkatan pelayanan pada berbagai bidang terutama pelayanan bagi masyarakat untuk lebih mempercepat peningkatan berbagai usaha yang perlu dikembangkan oleh masyarakat, pemerintah dan perusahaan swasta lainnya.

Untuk itu dalam rangka mempercepat upaya perubahan kondisi perekonomian suatu daerah

tertentu maka masyarakat sebagai subyek ekonomi yang dapat bergerak dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi sntral pengembangan dalam mengantisipasi suatu perubahan tersebut yakni pemekaran kabupaten selama ini sudah berjalan sudah 4 tahun yang lalu (2007) dalam memenuhi serta penyedia berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh pemerintah, masyarakat secara keseluruhan sehingga membantu pendistribuan kebutuhan mereka sehingga kegiatan ini akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang cukup memiliki modal untuk menciptakan berbagai jenis usaha sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat dari tahun ketahun.

Dengan pemekaran Kabupaten tersebut banyak mengandung makna yang sangat menguntungkan bagi daerah ini khususnya bagi suatu Desa yang sangat berdekatan dengan berdirinya kantor pemerintahannya yang telah dibangun karena menjadi suatu kebiasaan dengan berkembangnya suatu daerah pemekaran maka seluruh aktifitas disekitar perkantoran tersebut akan secara simultan dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi, pemasaran serta perkembangan politik terus berkembang dengan sendirinya, makanya di Desa Molingkapoto banyak usaha-usaha yang terus berkembang hanya semata-mata menjadi fasilitator pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitarnya seperti rumah maka, kios, foto copi dan lain sebagainya.

Dengan berjalannya kegiatan perekonomian ini banyak dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan penelitian ini sebagaimana mereka kemukakan dari hasil kuisioner berikut ini :



Tabel 6. Data Hasil Kuisisioner tentang pendapatan Masyarakat sesudah pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Pendapatan (Rp)	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	135.375 – 698.300	6	12,0
2.	698.301 – 1.261.226	4	8,0
3.	1.261.227 – 1.824.152	3	6,0
4	1.824.153 – 2.387.078	12	24,0
5	2.387.079 – 2.950.004	25	50,0
Jumlah		50	100

Sumber Data : Hasil Olahan , 2011

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan jumlah keadaan responden setelah pemekaran Kabupaten yang berdasarkan pada hasil kuisisioner pada berbagai jenis usaha mereka sehingga mereka mengatakan dalam kuisisioner yang diajukan adalah yang berpendapatan antara 135.375 – 698.300 kurang berkisar 6 orang atau 12,0 %, antara 698.301 – 1.261.226 hanya berkisar 4 orang atau 8,0 %, antara 1.261.227 – 1.824.152 hanya berkisar 3 orang atau 6,0 %, antara 1.824.153 – 2.387.078 hanya berkisar 12 orang atau 24,0 %, antara 2.387.079 – 2.950.004 hanya berkisar 25 orang atau 50,0 %.

Dengan melihat keadaan responden pada tabel tersebut dapat dijelaskan lagi bahwa rata-rata jumlah pendapatan masyarakat yang didasarkan pada kuisisioner tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang sangat baik sekali dimana telah menunjukkan angka pendapatan yang sangat baik sekali misalnya pada tahun 2011

pendapatan masyarakat sebesar Rp 2.387.079 – 2.950.004 dapat mengatakan jumlah reponden sudah mencapai sebanyak 50 orang atau 25 % dari responden dan sisanya tinggal 12 % masih dibawah terbagi pada beberapa tingkat pendapatan yang ada sehingga dengan adanya upaya pemekaran ini akan memberikan angin segar bagi berkembangnya kegiatan ekonomi disekitar kompleks perkantoran kantor bupati khususnya di Desa Molingkapoto terutama usaha rumah makan, kios dan usaha penyediaan fotocopy dan alat tulis menulis sehingga dapat memicu berkembangnya pendapatan masyarakat sekarang ini tetapi keadaan ini perlu tetap dipertahankan kalau bisa terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya lebih berkembang pada tahun akan datang.

Selanjutnya dapat dilihat keadaan pendapatan sebelum dan sesudah pemekaran pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Keadaan pendapatan sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten

No	Pendapatan ( Rupiah )	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
1	135.375 – 698.300	14	6
2	698.301 – 1.261.226	27	4
3	1.261.227 – 1.824.152	7	3
4	1.824.153 – 2.387.078	2	12
5	2.387.079 – 2.950.004	0	25
Jumlah		50	50

Sumber Data, Hasil Olahan Penelitian 2011

Dengan melihat tabel tersebut sangat jelas bahwa jumlah reponden dengan interval kelas pendapatan antara 135.375 – 698.300 jumlah responden sangat banyak 14 orang sebelum pemekaran kemudian setelah pemekaran semakin menurun tinggal berkisar 6 orang, antara 698.301 – 1.261.226 jumlah responden masih banyak berkisar 27 orang dan setelah pemekaran semakin menurun tinggal 4 orang, antara 1.261.227 –

1.824.152 tinggal berkisar 5 orang, antara 1.824.153 – 2.387.078 hanya berkisar 7 orang sebelum pemekaran kemudian setelah pemekaran tinggal 3, antara 2.387.079 – 2.950.004 sebelum pemekaran berkisar 2 orang tetapi setelah pemekaran naik sampai 12 orang, kemudian antara 2.387.079 – 2.950.004 responden menjawab nol sebelum pemekaran kemudian setelah meningkat kolompok ini akan meningkat responden 25 orang

berate mengalami peningkatan pendapatan masyarakat.

### c. Keadaan Investasi masyarakat Sebelum pemekaran Kabupaten

Perkembangan Investasi sebelum adanya pemekaran masih dirasakan belum memberikan peluang yang baik bagi berkembangnya investasi yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Molingkapoto yang menjadi salah satu desa berdirinya Kantor pemerintahan kabupaten.

Investasi yang dimaksud berupa pemilikan lahan yang ada yang dapat dijadikan sebagai obyek usaha bagi pemiliknya, maka hal ini belum dapat dimanfaatkan yang dapat dilihat pada jumlah – jumlah unit usaha yang belum berkembang pada masyarakat.

Untuk itu dengan berdasarkan hasil jawaban kuisioner yang diperoleh dari responden tentang pemanfaatan investasi yang dimiliki sebelum adanya pemekaran Kabupaten sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 8. Data Hasil Kuisioner tentang keadaan Investasi sebelum pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah responden	Porsentase (%)
1.	4.150.500 – 5.435.505	18	36,0
2.	5.435.456 – 6.720.511	29	58,0
3.	6.720.512 – 8.005.517	3	6,0
4.	8.005.517 – 9.290.523	0	0,0
5.	9.290.303 – 10.575.528	0	0,0
Jumlah		50	100

Sumber Data : Hasil Olahan , 2011

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan pemanfaatan investasi yang dimiliki oleh responden sebelum pemekaran sangat nampak sedikit nilai investasinya karena tidak dapat mendorong penggunaan investasi berbagai usaha yang banyak disebabkan oleh kondisi ekonomi dan jumlah penduduk masih normal tingkat pemnfaatan tersebut sehingga untuk melakukan pengembangan investasi yang dimiliki tidak memberikan harapan yang baik sehingga beberapa kuisioner mengatakan bahwa investasi yang mampu dilaksanakan hanya bisa berkisar diantara antara 4.150.500 – 5.435.505 mencapai 18 orang atau 36,0 %, dan antara 5.435.456 – 6.720.511 hanya berkisar 29 orang atau 58,0 %, dan antara 5.520.402 – 6.205.352 hanya berkisar 29 orang atau 58,0 %, antara 6.720.512 – 8.005.517 hanya berkisar 3 orang atau 6,0 %, dan antara 6.890.303 – 7.575.252 sampai seterusnya tidak mendapat nilai investasi mereka dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan melihat keadaan responden pada tabel tersebut dapat dijelaskan lagi bahwa rata-rata nilai pemanfaatan investasi yang dapat diterima oleh sejumlah responden dari sebagian masyarakat di Desa Molingkapoto masih berkisar pada nilai pemanfaatan investasi yang tertinggi adalah yakni

pada nilai investasi sebesar 5.520.402 – 6.205.352 sebanyak 58 % dari responden sisanya 42 % terdapat pada nilai investasi yang sangat rendah sehingga pada saat masyarakat berusaha mengembangkan usaha mereka tetapi karena kondisi perekonomian belum dapat memberikan peluang berusaha maka mereka tetap masih bertahan sampai pada nilai investasi bertambah nilainya apabila akan ditawarkan nilai jasanya, misalnya harga nilai tanah dan sebagainya.

### d. Keadaan Investasi Sesudah adanya pemekaran Kabupaten

Kemudian dengan terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara menjadi Kabupaten yang definitife sebagai hasil mekaran dengan Kabupaten Gorontalo maka hal ini akan menaikkan nilai investasi seseorang yang memilkinya menjadi lebih baik apalagi di Desa Molingkapoto dipilih menjadi ibu kota kabupaten dan sekaligus menjadi tempat berdirinya lingkungan perkantoran maka segala nilai investasi akan menjadi lebih meningkat sejak pemekaran tersebut.

Disamping itu karena berkembangnya tuntutan penyediaan fasilitas pendukung kegiatan berbagai pelayanan kepada masyarakat sehingga menuntut adanya berbagai jenis usaha yang berkembang pada masyarakat seperti rumah

makan, foto copy dan lain sebagainya, maka hal ini akan lebih meningkatkan nilai investasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk ditawarkan kepada para pengguna investasi yang mereka miliki.

Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan nilai investasi sejak adanya pemekaran kabupaten maka dapat dikemukakan pada hasil kuisioner diperoleh dari masyarakat adalah berikut ini :

Tabel 9. Data Hasil Kuisioner tentang Nilai investasi sesudah pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah responden	Prosentase (%)
1.	4.150.500 – 5.435.505	0	0,0
2.	5.435.456 – 6.720.511	3	6,0
3.	6.720.512 – 8.005.517	13	26,0
4	8.005.517 – 9.290.523	17	34,0
5	9.290.303 – 10.575.528	17	34,0
Jumlah		50	100

Sumber Data : Hasil Olahan , 2011

Untuk itu upaya pemekaran yang telah terjadi sekarang ini dapat berpengaruh pada nilai investasi pada masyarakat Desa Molingkapoto sebagaimana dikatakan oleh responden tersebut adalah nilai investasinya sekarang yang paling tertinggi sudah berkisar antara 8.005.517 – 9.290.523 sebanyak 17 orang atau 34,0 %, dan antara 9.290.303 – 10.575.528 hanya berkisar 17 orang atau 34,0 %, dan sisanya antara 6.720.512 – 8.005.517 hanya berkisar 13 orang atau 26,0 %, dan paling rendah berkisar antara 5.435.456 – 6.720.511 hanya berkisar 3 orang atau 6,0 %,

antara 9.710.523 – 10.575.527 hanya berkisar 0 orang atau 0,0 % berarti nilai investasi sekarang ini makin lama terjadi pemekaran akan lebih meningkat terus menerus nilai investasi yang dimiliki baik itu berupa lahan, maupun investasi lainnya yang sangat mempengaruhi perkembangan dari Kabupaten Gorontalo Utara kedepan.

Kemudian akan dapat dilihat jumlah pengembangan investasi sebelum dan sesudah pemekaran pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Keadaan Investasi sebelum dan sesudah pemekaran kabupaten

No	Investasi ( Rupiah )	Sebelum pemekaran	Sesudah pemekaran
1	4.150.500 – 5.435.505	18	0
2	5.435.456 – 6.720.511	29	3
3	6.720.512 – 8.005.517	3	13
4	8.005.517 – 9.290.523	0	17
5	9.290.303 – 10.575.528	0	17

Sumber data Hasil Olahan Penelitian 2011

Dengan melihat tabel tersebut sangat jelas posisi jumlah responden pada masing-masing nilai investasi sebelum pemekaran terlihat jumlah responden sangat besar tetapi pemekaran akan terus meningkat sampai pada tingkat nilai investasi tertinggi, berarti pemekaran ini sangat baik bagi peningkatan investasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Dampak pemekaran Kabupaten terhadap perkembangan Ekonomi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara

Untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang terjadi akibat adanya pemekaran kabupaten bagi berkembangnya perekonomian masyarakat di Desa Molingkapoto sebagai usaha yang telah dilakukan sebelum dan sesudahnya pemekatan serta nilai investasi yang terjadi sebelum dan sesudahnya maka perlu melakukan pengukuran

terhadap perkembangannya dengan menggunakan model *multiflier Effect* adalah sebagai berikut :

$$KI = \frac{\sum dy}{\sum di} = \frac{\sum Y_t - \sum Y_{t-1}}{\sum I_t - \sum I_{t-1}}$$

Dengan berdasarkan pada hasil kuisisioner sebagaimana pada lampiran tiga (3) Print input data sebagai hasil yang diperoleh dari masyarakat Desa Molingkapoto yang telah menjawab dengan

baik dan benar maka kemudian akan dihitung tentang efek *Mulifflier* yang terjadi setelah adanya pemekaran kabupaten Gorontalo utara adalah sebagai berikut :

$$K_i = \frac{\sum dy}{\sum dt} = \frac{\sum Y_t - Y_{t-1}}{\sum I_t - I_{t-1}} = \frac{62.331.425 - 104.746.900}{284088100 - 435.592.400}$$

$$\text{maka } K_i = \frac{-42.415.475}{-151.504.300} = 0,28$$

$K_i = 0,28$  berarti adanya pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara mengakibatkan pertambahan pendapatan maupun kenaikan nilai investasi sehingga masing-masing pendapatan akan meningkat yang dimiliki masyarakat sebagai akibat yang terjadi adanya pemekaran Kabupaten ini sehingga setiap kenaikan pendapatan dan investasi akan meningkat sebesar 0,28 kali dari sebelumnya.

## PEMBAHASAN

Dengan berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemekaran dapat memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan berbagai usaha dan sekaligus dapat memberikan kesempatan berkembangnya keinginan masyarakat untuk terus berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjadikan tingkat pendapatan perkapita masyarakat serta berkembangnya investasi yang dimiliki masyarakat yang tadinya tidak dimanfaatkan kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha tersebut.

Untuk itu dengan melihat perkembangan ekonomi masyarakat sebelum terjadi pemekaran maka nampak adanya jumlah responden masih banyak memiliki tingkat pendapatan yang masih rendah yakni sekitar 36 % dari responden yang memberikan gambaran terjadinya banyak kekurangan yang belum terbukanya akses jalan misalnya sehingga dapat berpengaruh pada kurangnya pemasaran hasil pertanian, kurangnya

daya beli masyarakat dan kondisi obyektif yang tidak bisa berkembang yaitu informasi yang lambat dan tingkat pendidikan masih rendah.

Kemudian setelah terjadi pemekaran maka peluang bisnis yang terjadi pada daerah ini menjadi lebih terbuka pengembangannya dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat sehingga semuanya ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki investasi untuk memanfaatkan investasinya untuk menciptakan berbagai jenis usaha yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

## SIMPULAN

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat perkembangan ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah terjadi pemekaran yakni pada masyarakat nampak bahwa terjadi kenaikan pendapatan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi tingkat pelayanan yang optimal.
2. Dengan adanya pemekaran kabupaten secara definitife terus memberikan peluang berkembangnya kegiatan berbagai usaha bisnis pada masyarakat maka diperlukan peningkatan pemenuhan tingkat kebutuhan masyarakat maka hal ini telah terbukti pula semakin meningkat nilai investasi yang semakin membaik

3. Dengan hasil kajian yang menunjukkan nilai Multiplier Efek sebesar 0,28 berarti setiap ketambahan pendapatan dan investasi sebelum dan sesudah pemekaran maka masing-masing akan meningkat sebesar 28 kali dari semula sebelum terjadi pemekaran.

#### SARAN

1. Dengan melihat bentuk keadaan masyarakat sebelum pemekaran maka perlu menjadi pengalaman selama ini karena sangat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya terutama peluang pemasaran hasil pertanian, kerajinan lokal yang kurang berkembang sehingga segala bentuk kegiatan yang terjadi tersebut akan terus meningkat maka upaya terakhir perlu peningkatan polarisasi bentuk produksi pada masyarakat misalnya pisang bisa diproduksi menjadi barang produksi yang lebih disukai masyarakat tentu dibutuhkan teknologi pengelolaannya lebih lanjut sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak.
2. Dengan adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah pemekaran yang disertai dengan nilai investasi terus meningkat maka perlu adanya penetapan standar bagi setiap investasi yang dimiliki misalnya untuk tanah harus perlu ditingkatkan penetapan obyek pajaknya oleh pemerintah sehingga harga jual beli tanah tersebut berdasarkan nilai NJOP tersebut sehingga tidak terjadi penggelembungan harga nilai investasi tersebut di masyarakat.
3. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tersebut maka menjadi acuan utama bagi seluruh desa-desa yang berada disekitarnya untuk terus berusaha agar pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dari tahun ketahun sehingga struktur ekonomi masyarakat akan meningkat pula.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ke dua, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln, 2001, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, edisi pertama, penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Bangun, Wilson, 2007, *Teori Ekonomi Mikro*, Penerbit PT Rafika Aditama, Bandung
- Badudu, J. S, 2000, *Kamus Umum Indonesia*, Penerbit Jakarta
- Boediono, 2001, *Ekonomi Mikro Edisi II*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Budiharsono, Sugeng, 2005, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan*, Cetakan 2, PT Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta
- Jhingan, ML, 2003, *Ekonomi Pembangunan dan Penencanaan*, Penerbit PT Grafindo Persada, Jakarta
- Kaharu, Usman, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Nurul Jannah, Gorontalo
- Mundiharno, 2009, *Posisi Penduduk dalam teori pertumbuhan ekonomi*, Jakarta
- Sanusi, Buchrawi, 2004, *Pengantar ekonomi Pembangunan*, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 2007, *Ekonomi Pembangunan, Proses Masaalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 2010, *Ekonomi Pembangunan, Proses Masaalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Penerbit Fakultas Ekonomi, Penerbit Kecana Perdana Media Group, Jakarta
- Suparmoko, M, 2003, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Rahardja, Prathama dkk, 2008, *Pangantar Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi & Makroekonomi, Edisi Ketiga*, Penerbit LP Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Rahardja, Prathama dkk, 2010, *Teori Ekonomi Makaro Suatu Pengantar, Edisi Keempat*, Penerbit LP Fakultas Ekonomi UI, Jakarta
- Todaro, M, 2001, *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, Penerbit, Bumi Aksara, Jakarta.